

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-
XIII/2015 DIKAITKAN DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM
TAHAPAN PENCALONAN OLEH KANDIDAT PETAHANA UNTUK
MENCIPTAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG
DEMOKRATIS**



**Penulisan Hukum
(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Meraih
Derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh : ROCHMAD ABU
BAKAR NIM. E0012342**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-
XIII/2015 DIKAITKAN DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM
TAHAPAN PENCALONAN OLEH KANDIDAT PETAHANA UNTUK
MENCiptAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG
DEMOKRATIS**


Oleh :

Rochmad Abu Bakar
NIM. E0012342

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**


Surakarta, 25 Agustus 2016

Pembimbing I



Suranto, S.H., M.H.
NIP. 195608121986011001

Pembimbing II



Jadmiko Anom Husodo, SH, MH.
NIP. 197004241995121001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 DIKAITKAN DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM TAHAPAN PENCALONAN OLEH KANDIDAT PETAHANA UNTUK MENCIPTAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS

Oleh :

Rochmad Abu Bakar

NIM. E0012342

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 03/Oktober/2016

DEWAN PENGUJI

(1) **DR. Isharyanto, S.H., M.Hum.**

NIP : 197805012003121002

Ketua

(2) **Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H.**

NIP : 197004241995121001

Sekretaris

(3) **Suranto, S.H., M.H.**

NIP : 195608121986011001

Anggota



: (.....)



: (.....)



: (.....)

Mengesah
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19601107198611001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rochmad Abu Bakar
NIM : E0012342

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 DIKAITKAN DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM TAHAPAN PENCALONAN OLEH KANDIDAT PETAHANA UNTUK MENCIPTAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 23 Agustus 2016
Yang Membuat Pernyataan,

Rochmad Abu Bakar
NIM. E0012342

MOTTO

Ambil hikmah di masalalu untuk menjadi yang lebih baik kedepannya (kakang tersayang)

Refresing hanya alasan seseorang untuk bermalas-malasan (Oda)

Berfikir Positif terus dan pasti suatu saat hal positif akan datang.

Benar menurut Manusia itu relatife, tetapi Benar menurut Allah SWT itu Absolut.



PERSEMBAHAN

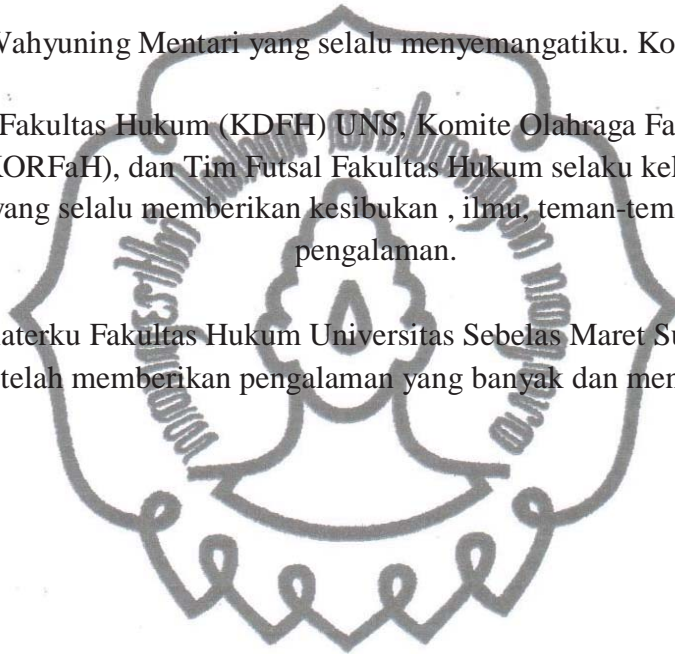
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada :

Keluargaku sebagai tempat ku berproses, bernaung dan mendapatkan penghidupan yang layak selama ini, Bapak Parjanto, Ibu Sarjinem, Mbak Vivi Dyah Hapsorowati.

Devita Wahyuning Mentari yang selalu menyemangatiku. Komunitas Debat

Fakultas Hukum (KDFH) UNS, Komite Olahraga Fakultas Hukum (KORFaH), dan Tim Futsal Fakultas Hukum selaku keluargaku yang di Solo yang selalu memberikan kesibukan, ilmu, teman-teman lucu, dan pengalaman.

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang Yang telah memberikan pengalaman yang banyak dan menyenangkan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul :“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Konflik Kepentingan Dalam Tahapan Pencalonan Oleh Kandidat Petahana Untuk Menciptakan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis”.

Penulisan ini merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan izin penulisan hukum ini;
2. Bapak Suranto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan izin penulisan hukum ini;
3. Bapak Jadmiko Anom Husodo, SH, MH.dan Ibu Aminah, SH., MH.selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Bapak Achmat , S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Tim Pengelola Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu selama proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
7. Bapak dan Ibu bagian kemahasiswaan, bagian pendidikan bagian umum dan unit perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan banyak semangat serta dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

8. Kedua orang tua tersayang yang telah membesarkan dan memberikan banyak perhatian dengan penuh kasih sayang.
9. Kakakku Vivi yang selalu memerintahkanku untuk menyelesaikan skripsi saat saya sedang malas terima kasih banyak;
10. Teman-teman KDFH UNS seangkatan Okti, Dinar, Linov, Abi, Bangkit, Sigit, Satria, Tegar, Dewa, dan Adit yang telah memberikan hiburan selama berorganisasi;
11. Teman-teman KORFaH Mas Aan, Mas Anggy, Mbak Gita, Mbak Novika, Mbak Julia Rani, Mas Graham, Mbak Julia Cristina, Mbak Kike, Mbak Nela, dan masih banyak lagi yang telah memberikan hiburan selama berorganisasi;
12. Teman-teman FH UNS 2012, yang memberikan kenyamanan dan kehangatan bagi penulis selama kuliah;
13. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Surakarta, 23 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	Xi
<i>ABSTRACT</i>	Xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan tentang Demokrasi.....	14
2. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi.....	19
3. Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	27
4. Tinjauan tentang Tahanan Pencalona.....	38
5. Tinjauan tentang Konflik Kepentingan	45
6. Tinjauan tentang Kandidat Petahana	48
B. Kerangka Pemikiran	49

1. Bagan Alur Pemikiran	49
2. Kerangka Pemikiran	50

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Menimbulkan Konflik Kepentingan Dalam Tahapan Pencalonan Oleh Kandidat Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah	51
a. Pelaksanaan Pemilukada Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015	51
b. Dampak Buruk Dari Adanya Pelaksanaan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dalam Pemilukada	69
c. Dampak Buruk Dari Adanya Konflik Kepentingan	73
2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIII/2015 Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan dalam Tahapan Pencalonan oleh Kandidat Petahana Untuk Menciptakkan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis.....	79
a. Pelaksanaan Pemilukada Oleh Lembaga Yang Bertanggung Jawab	80
b. Teknis Pelaksanaan Pemilukada Agar Terhindar Dari Konflik Kepentingan	86
c. Solusi Pelaksanaan Pemilukada Agar Menciptakkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis	95

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Rochmad Abu Bakar. 2016. E0012342. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 DIKAITKAN DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM TAHAPAN PENCALONAN OLEH KANDIDAT PETAHANA UNTUK MENCIPTAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Keluarga petahana dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah tanpa menunggu jeda satu periode terlebih dahulu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 memberikan masalah baru dalam tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Permasalahan tersebut lebih kepada adanya calon kepala Daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Kewenangan dari Petahana tersebut mengakibatkan beberapa permasalahan seperti tidak menciptakan kompetisi Pilkada yang setara, mempengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada, menimbulkan dinasti politik, dan Menciptakan praktik korupsi politik.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah haruslah dilaksanakan secara Demokratis. Untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis tanpa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 harus dibuat formulasi baru. Formulasi tersebut lebih kepada pengawasan terhadap Petahana agar tidak memanfaatkan kewenangannya untuk memenangkan keluarganya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pengawasan tersebut harus dilakukan oleh stakeholders terkait sehingga dapat tercapai Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, Petahana.

ABSTRACT(PROSES)

Rochmad Abu Bakar. 2016. E0012342. ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 33 / PUU - XIII / 2015 ASSOCIATED CONFLICTS OF INTEREST IN STAGES WITH NOMINATION OF CANDIDATES BY INCUMBENT TO CREATE A REGIONAL HEAD OF DEMOCRATIC ELECTIONS. Legal Writing (Skripsi). Faculty Of Law University Sebelas Maret.

This study describes and examines the issues regarding implementation of the phases candidacy in local elections after the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 33 / PUU - XIII / 2015. Families incumbent can run in local elections without waiting for the break of the first period. Constitutional Court Decision No. 33 / PUU - XIII / 2015 provides new problems in the nomination stage local elections . The problems over to their prospective head region with a conflict of interest with the incumbent . The authority of the incumbent resulted in several problems such as not creating equal electoral competition , affecting the accountability of the election , causing political dynasty , and created the practice of political corruption

Article 18 paragraph (4) of the Constitution of 1945 has mandated that local elections should be conducted in the Democratic . To realize the democratic local elections without conflicting with the Constitutional Court Decision No. 33 / PUU - XIII / 2015 should be made of new formulations . The formulation is more to the oversight of the incumbent to not take advantage of his authority to his family won in local elections . The surveillance must be carried out by stakeholders associated so as to achieve democratic local elections .

Keywords : Constitutional Court , local elections , incumbent .